

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengenalan koperasi di Indonesia sendiri memanglah dilaksanakan dengan bantuan serta dorongan pemerintah dan sudah diperkenalkan sejak pemerintahan Belanda. Koperasi di perkenalkan menjadi suatu gerakan pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya melalui sebuah kongres Koperasi. Koperasi di tanah air adalah lembaga keuangan yang unik dimana tumbuh secara alami dari jaman penjajahan hingga saat ini yang telah mengalami beberapa pembaharuan kemudian diberikan kedudukan yang cukup tinggi dalam penjelasan Undang-Undang Dasar. Dengan adanya hal tersebut muncullah berbagai macam penafsiran bagaimana caranya agar suatu perkoperasian di Indonesia bisa tumbuh dan berkembang.

Sehingga adanya penempatan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu landasan struktural koperasi Indonesia. Dalam UUD 1945 Pasal 33 (1) telah dikatakan bahwa perekonomian yang hendak disusun Indonesia adalah “usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”¹ kemudian dikemukakan juga oleh Mohammad Hatta yang dimaksud dengan Koperasi adalah usaha bersama atas asas kekeluargaan.

¹ Panji Anoraga & Ninik Widiyanti. *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) hal.3.

Dengan arti koperasi tersebut maka koperasi memiliki peranan yang besar dalam penyusunan usaha bersama dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas. Dalam usahanya, koperasi memiliki tujuan bersama yaitu meningkatkan kebutuhan dan kemampuan dalam mempertahankan diri serta membebaskan diri dari kesulitan.



Di Indonesia, khususnya daerah Jawa Tengah terdapat 26 ribu koperasi. Salah satunya yaitu koperasi pegawai “SEJAHTERA” yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Koperasi Pegawai ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penampung dana pegawai PNS dan juga berfungsi sebagai penyalur dana dalam bentuk pinjaman dan atau tambahan modal untuk kelancaran usahanya. Koperasi Pegawai Republik Indonesia tidak hanya memberikan pelayanan simpan pinjam saja, tetapi ada beberapa produk lainnya seperti *minimarket*, jasa *fotocopy* dan jasa lainnya. Selain itu, Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” melayani pinjaman dengan rata-rata plafon yang rendah, baik dalam bentuk pinjaman sebrakan maupun pinjaman tahunan.

Dana pinjaman adalah sebuah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian dengan perjanjian yang pembayarannya dilakukan pada suatu jangka waktu tertentu yang disepakati bersama. Untuk membantu pegawai negeri sipil khususnya pegawai negeri sipil yang bekerja di Dinas Kesehatan dalam memenuhi kebutuhannya, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas mendirikan Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA”. Dalam berbagai kegiatan semua pihak memerlukan prosedur sebagai acuan untuk meminimalisir kesalahan serta resiko yang akan timbul. Begitu pula dengan pemberian pinjaman, hal ini memerlukan prosedur yang tepat agar penyaluran pinjaman berjalan dengan baik serta jelas, baik dalam segi penyaluran maupun pembukuannya. Dengan adanya prosedur yang baik dan benar, maka ini akan memperlancar serta mempermudah kegiatan koperasi.

Dalam hal pemberian pinjaman, Koperasi harus memiliki kepercayaan yang besar terhadap nasabah yang akan diberikan dana pinjaman, bahwa dana pinjaman itu memang benar-benar dibutuhkan. Kemudian, sebelum nasabah mendapatkan dana tersebut, nasabah harus melewati beberapa prosedur seperti mengisi formulir pengajuan pinjaman, mengetahui ketua kelompok puskesmas / Rumah Sakit masing-masing, dilengkapi dengan lampiran struk gaji pegawai, kemudian diajukan ke koperasi hingga pencairan dana. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan seperti kredit atau pinjaman macet.

Dengan pentingnya prosedur pemberian pinjaman bagi pegawai yang membutuhkan dana, maka penulis menyusun Tugas Akhir dengan judul **“PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA “SEJAHTERA” DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, setiap perusahaan atau instansi harus memperhatikan prosedur setiap pemberian pinjaman dana dengan baik dan benar, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian pinjaman pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” ?
2. Bagaimana cara penyelesaian masalah apabila terjadi pinjaman macet dalam pelaksanaan proses pinjaman ?

1.3 Maksud, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1.3.1 Maksud Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Maksud Praktik Kerja yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan PKL yaitu :

- a. Mempelajari bidang pekerjaan tertentu pada tempat PKL.
- b. Mencari pengalaman dalam bekerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.
- c. Melakukan PKL sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

1.3.2 Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun tujuan dari penulisan laporan ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian pinjaman pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui langkah penyelesaian pinjaman macet pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

1.3.3 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Adapun manfaat dari pelaksanaan praktik kerja lapangan antara lain :

a. Manfaat bagi Mahasiswa

- Sebagai bahan untuk perbandingan antara teori-teori dan praktik dalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya dengan pelaksanaan praktik kerja lapangan.
- Digunakan sebagai bahan untuk menerapkan, membandingkan dan menambah ilmu untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam dunia kerja
- Sebagai bahan dalam penyusunan Tugas Akhir.
- Sebagai sarana untuk melatih *hardskill* dan *softskill* yang akan dipergunakan untuk masuk ke dalam dunia kerja.
- Meningkatkan potensi serta kemampuan mahasiswa sesuai dengan program studi yang diampu.

b. Manfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- Sebagai bahan referensi untuk wacana dan tambahan informasi.
- Sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk meningkatkan kurikulum.
- Digunakan sebagai patokan dalam mempersiapkan lulusan terbaik yang mampu serta siap masuk ke dalam dunia pekerjaan.

- c. Manfaat bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
- Dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan serta perkembangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
 - Dapat menjadi bahan serta masukan yang berkaitan dengan pemberian pinjaman bagi pegawai negeri sipil.

1.4 Pembatasan Masalah

Dalam tulisan ini, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini dibatasi hanya pada Prosedur Pemberian Pinjaman pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, adapun metode yang digunakan yaitu :

1. Data Primer

Adalah data yang didapat penulis langsung dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Data primer ini didapat melalui :

a. Metode Wawancara

Yaitu melakukan wawancara langsung dengan pegawai Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai prosedur pemberian pinjaman pada koperasi tersebut.

b. Metode Observasi

Yaitu dengan cara mengamati dan terjun langsung kepada obyek yang dituju serta melakukan pencatatan terhadap elemen-elemen yang menjadi obyek kerja praktik.

2. Data Sekunder

Adalah data tambahan yang mendukung di dalam pembuatan laporan kerja praktek. Data sekunder didapat melalui :

a. Metode Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat atau membaca dokumen yang berkaitan dengan penyusunan laporan kerja praktek dan melihat arsip yang disimpan dalam koperasi.

b. Metode Studi Pustaka

Adalah pengumpulan data secara teoritis serta bacaan lainnya yang berhubungan dengan Prosedur Pemberian Pinjaman pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

1.6 Prosedur dan Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

NO	KETERANGAN	FEB				MAR				APR				MEI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TAHAP PERSIAPAN																	
1.	Mengajukan Judul Tugas Akhir																
2.	Meminta Surat Pengantar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis																
3.	Meminta konfirmasi persetujuan dari pihak pemberi tempat PKL																
TAHAP PELAKSANAAN																	
1.	Melaksanakan praktik kerja																
2.	Mempelajari Bidang yang dikerjakan pada saat di tempat praktik																
3.	Melakukan praktik kerja langsung																
4.	Melakukan wawancara kepada karyawan																
5.	Melakukan Pengumpulan Data baik dalam bentuk dokumen maupun dalam bentuk observasi																
6.	Mengucapkan terimakasih dan memohon pamit karena telah usai melaksanakan PKL																
TAHAP PELAPORAN																	
1.	Menyusun laporan hasil PKL																
2.	Melaksanakan bimbingan laporan kerja praktek																
3.	Melakukan penyempurnaan laporan kerja praktik																

Tabel 1.6 Prosedur dan Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan